



**LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH  
DAERAH  
( LPPD )  
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS KESEHATAN**

**Jalan H. Boejasin No 9 Pelaihari**

**Telp (0512) 21098**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia- Nya

Sehingga Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang - Undang RI 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 Ayat (1) Mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah.

Dalam Rangka memenuhi maksud ketentuan diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut telah menyusun bahan LPPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan urusan wajib dan pelayanan dasar bidang kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah secara lebih efektif dan edisien.

Semoga upaya kita mendapat Rahmad, Hidayah dan Ridha Nya. Aamiin.

Pelaihari, 24 Januari 2022  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut

**Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut**



**Hi. Nina Sandra, SKM, M.M**  
**NIP 196407101985112023**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Penjelasan Umum .....	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah .....	13
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	15
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> .....	<b>19</b>
2.1 Capaian Kinerja Makro .....	19
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	20
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	20
Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	27
2.3 Akuntabilitas Kinerja Organisasi .....	32
2.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	37
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN</b> .....	<b>40</b>
3.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima.....	40
3.2 Tugas Pembantuan Yang Di Berikan .....	40
<b>BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL</b> .....	<b>45</b>
4.2 Bidang Urusan Kesehatan .....	45
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	45
4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah.....	46
4.1.3 Realisasi .....	52
4.1.4 Alokasi Anggaran .....	64
4.1.5 Dukungan Personil.....	65
4.1.6 Permasalahan dan Solusi.....	65
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sebaran Penduduk per Kecamatan Tahun 2021 .....	6
Tabel 1.2	Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut Beserta Jumlah Desa/Kelurahan Dan Luas Wilayah .....	7
Tabel 1.3	Daftar Perangkat Daerah SKPD Dinas Kesehatan .....	8
Tabel 1.4	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 .....	12
Tabel 1.5	Prioritas Pembangunan Daerah.....	14
Tabel 1.6	Hubungan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah.....	15
Tabel 1.7	Perangkat Daerah SKPD Dinas Kesehatan Pengampu SPM di Kabupaten Tanah Laut .....	18
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro.....	19
Tabel 2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Dinas Kesehatan .....	20
Tabel 2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	27
Tabel 2.4	Target dan Realisasi Sasaran Strategis Dinas Kesehatan .....	32
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama .....	38
Tabel 3.1	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 .....	41
Tabel 4.1	Jenis Pelayanan Dasar SPM pada Bidang Kesehatan Tahun 2021 ..	45
Tabel 4.2	Target Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2021 .....	47
Tabel 4.3	Target Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2021 .....	47
Tabel 4.4	Target Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2021.....	47
Tabel 4.5	Target Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2021 .....	48
Tabel 4.6	Target Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Tahun 2021 ..	48
Tabel 4.7	Target Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Tahun 2021 .....	49
Tabel 4.8	Target Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Tahun 2021 .....	49
Tabel 4.9	Target Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2021 .....	50
Tabel 4.10	Target Pelayanan Kesehatan Penderita DM Tahun 2021 .....	50
Tabel 4.11	Target Pelayanan Kesehatan ODGJ Tahun 2021 .....	51
Tabel 4.12	Target Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB Tahun 2021 .....	51
Tabel 4.13	Target Pelayanan Kesehatan Terinfeksi HIV Tahun 2021 .....	52
Tabel 4.14	Pencapaian SPM Usia Lanjut .....	52
Tabel 4.15	Pencapaian SPM Hipertensi.....	53
Tabel 4.16	Pencapaian SPM DM.....	54
Tabel 4.17	Pencapaian SPM ODGJ .....	55
Tabel 4.18	Pencapaian SPM TB .....	56
Tabel 4.19	Pencapaian SPM HIV .....	57
Tabel 4.20	Pencapaian SPM IBU Hamil .....	58
Tabel 4.21	Pencapaian SPM Bayi Baru Lahir .....	59
Tabel 4.22	Pencapaian SPM Ibu Bersalin.....	60
Tabel 4.23	Pencapaian SPM Pelayanan Balita .....	61
Tabel 4.24	Pencapaian SPM Usia Produktif.....	62
Tabel 4.25	Pencapaian SPM Usia Pendidikan Dasar.....	63
Tabel 4.26	Alokasi Anggaran SPM Urusan Bidang Kesehatan Tahun 2021 ....	64
Tabel 4.27	Dukungan Personil Puskesmas .....	65
Tabel 4.28	Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM .....	65

# BAB I PENDAHULUAN

## **1.1 Latar Belakang**

### **1.1.1 Penjelasan Umum**

#### **a. Undang – Undang Pembentukan Daerah**

Kabupaten Tanah Laut dibentuk dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tanah Laut berkedudukan di Pelaihari dan terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pelaihari, Jorong, Bati-Bati, Kurau dan Takisung.

Pada era desentralisasi dengan diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2000 berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999, diperbaharui dengan UU Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, maka beberapa peran pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah Daerah sebagai kewenangan wajib dan tugas pembantuan, salah satunya bidang pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu unit kerja yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut berdasar Peraturan Bupati Tanah Laut No. 24 Tahun 2009.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan maka perlu Mengevaluasi tugas pokok tersebut dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Dinas Kesehatan (LKPJ) dimana dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD.

#### **b. Data Geografis Wilayah**

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Tanah Laut yang beribukota Pelaihari berada di bagian selatan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi 114°30'20" - 115°20'00" Bujur Timur dan 3°30' 33" - 4°10' 30" Lintang Selatan.

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah daratan mencapai 3.631,35 km<sup>2</sup> (363.135 Ha) atau 9,17% dari luas wilayah Kalsel. Luas tersebut belum termasuk luas zona perairan laut, sepanjang 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 km. Bila luas daratan Kabupaten Tanah Laut ditambah dengan luas zona perairan lautnya, maka luas total luas wilayah menjadi 449.730 Ha atau 4.497,3 km<sup>2</sup>. Adapun batas administrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

Utara : Kota Banjarbaru  
Selatan : Laut Jawa  
Timur : Kabupaten Tanah Bumbu  
Barat : Laut Jawa

Ditinjau dari segi topografinya, wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh dataran rendah yang landai, yang membentang dari Barat ke Timur, mulai dari arah Selatan (Pantai Laut Jawa) ke arah Utara (pedalaman), dan bergelombang hingga bergunung didaerah pedalaman yang berbatas dengan Kabupaten Banjar. Secara umum dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat di bagi atas 2 (dua) bagian besar, yaitu:

1. Bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga berombak. Bentangan daerah ini memanjang dari Timur ke Barat dengan lebih melebar di bagian Barat yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai, muara sungai dan Pantai Laut Jawa.
2. Bagian utara, merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Pada wilayah ini terdapat beberapa puncak, yaitu:
  - Puncak gunung Kemuning (750 m dpl)
  - Puncak Gunung Batu Karo (621 m dpl)
  - Puncak Gunung Batu Balerang (921 m dpl)
  - Puncak Gunung Kematian (951 m dpl)
  - Puncak Gunung Batu Mandi (901 m dpl)
  - Puncak Gunung Sekupang (1.051 m dpl)
  - Puncak Gunung Haur Bonak (744 m dpl)
  - Puncak Gunung Aur Bunek (1.150 m dpl)
  - Puncak Gunung Condong (553 m dpl)

Dilihat dari sudut ketinggian tempat (elevasi), wilayah Kabupaten Tanah Laut dibagi 6 (enam) kelas elevasi , yaitu kelas 0 – 7 meter, 7 - 25 meter, 25 - 100 meter, 100 - 500 meter, 500 – 1000 meter dan diatas 1000 meter.

Kelas ketinggian (elevasi) lahan yang paling luas di Kabupaten Tanah Laut adalah kelas elevasi 0 - 7 meter dpl, yaitu mencapai 58.240 Ha (15.6 % dari luas daratan). Sedangkan kelas ketinggian yang paling kecil luasnya adalah kelas elevasi di atas 1.000 meter dpl, yaitu 13.661 Ha (3,7% dari luas daratan). Kelas elevasi ketinggian 0-7 meter dpl terdapat di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang sedangkan kelas elevasi ketinggian di atas 500 meter terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati.

Kemudian kemiringan/kelerengan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan tanah terhadap erosi tanah, Semakin tinggi/terjal lerengnya semakin peka tanah terhadap erosi. Bila dilihat dari kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibedakan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. 0 – 3 %, sebagian besar tersebar di wilayah Timur membentang dari bagian Barat hingga Timur, mulai dari Selatan (pantai) ke Utara (pedalaman) dengan luas 250.460 Ha (67,16 % dari luas total daratan)
2. 3 – 8 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 44.830 Ha (12,02 % dari luas total daratan).
3. 8 – 15 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 31.600 Ha (8,47 % dari luas total daratan)
4. 15 – 25 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 21.805 Ha (5,85 % dari luas total daratan)
5. 25 – 40 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 10.690 Ha (2,87 % dari luas total daratan)
6. 40 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 13.545 Ha (3,63 % dari luas total daratan)

Wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh kelas lereng 0 – 3% yaitu sebesar 67,16% dari luas total wilayah daratan. Kelas lereng tersebut selain potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) berpotensi juga untuk perikanan tambak bagi wilayah yang ada di sepanjang pantai.

Berdasarkan tinjauan terhadap peta geologi Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Laut berumur antara mesozoik, tersier dan kuartar. Secara fisiografis Kabupaten Tanah Laut terletak di bagian ujung Barat Daya Pegunungan Meratus dan dibagian Selatan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam. Pegunungan Meratus terutama ditempati oleh batuan pratersier, sedangkan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam ditempati oleh batuan sediment tersier.

Morfologi wilayah di Kabupaten Tanah Laut dapat dibagi menjadi 4 (empat) satuan morfologi yaitu satuan morfologi dataran, dataran bergelombang, perbukitan dan pegunungan. Satuan morfologi dataran menempati bagian ujung Selatan dan ujung Barat. Ketinggian berkisar antara 0 – 10 m dpl. Satuan ini berupa endapan alluvium rawa dan pantai yang tersusun dari batuan sediment kwarter. Satuan Morfologi Dataran

Bergelombang menempati bagian Barat dan Selatan, yaitu sekitar jalur jalan raya Bati-bati, Pelaihari, Asam-asam, Pelaihari – Batakan dan Pelaihari – Takisung.

Ketinggian berkisar antara 10 – 50 m dpl. Satuan ini tersusun oleh batuan sediment kwarter dan tersier. Satuan Morfologi Perbukitan menempati bagian tengah merupakan kaki dari Pegunungan Meratus. Ketinggian berkisar antara 50 – 250 m dpl. Satuan ini tersusun oleh batuan metamorf dan sediment serta sebagian kecil batuan beku. Satuan Morfologi Pegunungan menempati bagian Utara, dicirikan oleh lereng yang terjal dengan ketinggian puncak lebih dari 250 m dpl. Beberapa puncaknya seperti Gunung Kematian (951 m dpl), Gunung Batu Belerang (921 m dpl), Gunung Batu Karo (621 m dpl).

Jenis Tanah yang ada di Wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah podsolik, latosol, alluvial dan gleisol. Yang mendominasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah Alluvial, Podsolik dan Laotosol. Sedangkan jenis tanah Gleisolhanya sebagian kecil saja, dan tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Kurau, Bati-Bati, Takisung, Tambang Ulang, Pelaihari dan Panyipatan.

1. Jenis tanah latosol memiliki solum tanah tebal sampai sangat tebal, kandungan bahan organik 3 – 9 %, pH tanah antara 4,5 – 6,5 yaitu dari masam sampai agak masam, struktur tanahnya lemah dan konsistennya gembur. Secara keseluruhan tanah ini mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang baik, sehingga produktivitas lahannya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 108.780 Ha (29,17 % dari luas daratan seluruhnya).
2. Jenis tanah Alluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanahnya masam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsure haranya relative kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 120.290 Ha (32,26 % dari luas lautan).
3. Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang paling tebal yaitu 90 – 180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur di bagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5 %, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (pH) sangat masam sampai sangan masam yaitu 4 – 5,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia kurang baik, sifat fisika tidak mantap karena sifat agregatnya kurang baik, sehingga mudah terkena erosi. Produktivitasnya adalah rendah sampai sedang, menempati areal satuan 123.010 Ha (32,98% dari total daratan).

Wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki tekstur tanah dengan klasifikasi yaitu tekstur halus (lempung berliat hingga liat), tekstur sedang (lempung sampai lempung liat berdebu) dan tekstur kasar (lempung berpasir sampai berkerikil). Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi.

Umumnya tanah di Kabupaten Tanah Laut bertekstur sedang yang meliputi jenis tanah alluvial, latosol dan podsolik yaitu 297.285 Ha (79,91 % dari luas total daratan), tanah bertekstur halus meliputi jenis tanah gleisol dan podsonik seluas 46.750 Ha (12.54 % dari luas total daratan) dan tanah yang bertekstur kasar meliputi jenis tanah alluvial seluas 28.915 Ha (7.75 % dari luas total daratan). Dengan demikian, di Kabupaten Tanah laut sedikitnya terdapat 28.915 Ha (7.75% dari luas total daratan) mempunyai kendala dalam pengembangan kawasan budidaya dengan faktor pembatas tekstur tanah yang kasar.

Kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Tanah Laut di klasifikasikan kedalam 4 (empat) kelas kedalaman efektif tanah yaitu dalam (lebih dari 90 cm) sedang (80 – 90 cm), dangkal (30 – 60 cm) dan sangat dangkal (kurang dari 30 cm). Kedalaman efektif tanah akan berpengaruh terhadap wilayah perakaran tanaman, jenis tanaman/tumbuhan dan tegakan tanaman.

Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah beriklim tropis basah karena tidak terdapat perbedaan musim yang jelas. Hujan turun merata sepanjang tahun dengan bulan-bulan relatif basah antara Bulan Desember – Februari dan bulan-bulan relatif kering antara bulan Juni – Agustus. Berdasarkan hasil penelitian antara 1915 – 1941, curah hujan bagian Timur/pantai sebesar 2,324 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 150 hari/tahun dan di bagian Barat sampai dengan perbatasan kabupaten. Curah hujan berkisar antara 2.500 – 3.000 mm/tahun dan di wilayah Timur berkisar antara 2.000 – 2.500 mm/tahun.

Data curah hujan rata-rata bulanan dan perhitungan evapotranspilasi bulanan menyebabkan Kabupaten Tanah laut setiap bulannya tidak mengalami kekurangan air. Tanaman tahunan tidak memerlukan adanya air irigasi pada bulan-bulan yang *water balance* nya kurang dari 100 mm akan mengalami kekurangan air.

Di Kabupaten Tanah Laut keadaan hidrologi atau sumber daya air dapat dikelompokkan atas 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Sungai atau Danau : Keadaan hidrologi sungai dan danau sebagai sumber daya air permukaan di Kabupaten Tanah Laut atas sungai-sungai besar dan kecil yang bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai besar antara lain Sungai Maluka (640 Km<sup>2</sup>), Sungai Tabanio (770 Km<sup>2</sup>), Sungai Sabuhur (190 Km<sup>2</sup>), Sungai Swarangan (580 Km<sup>2</sup>). Fungsi-fungsi sungai tersebut adalah untuk sumber air minum, pengairan, usaha perikanan dan sebagai sarana transportasi antara

daerah/daerah timur dengan daerah-daerah Barat di Kabupaten Tanah Laut. Adapun danau-danau (rawa) yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut yaitu Rawa Benua Raya (6.600 Ha), Rawa Panjaratan (2.500 Ha) dan Rawa Sanipah (5.600 Ha). Pada musiman hujan terdapat wilayah yang terkena banjir, baik terus menerus tergenang maupun tergenang secara periodik. Wilayah yang selalu tergenang adalah daerah Benua Raya dan Panjaratan.

2. Air Tanah : Kedalaman air tanah di suatu wilayah antara lain ditentukan oleh tinggi wilayah dari permukaan laut, jenis batuan induk dan sebagainya. Wilayah Kabupaten Tanah Laut tersusun dari batuan induk yang bervariasi dan terletak pada ketinggian 0–1000 m dpl. Oleh sebab itu kedalaman air tanahnya kan bervariasi, dari dangkal (daerah pantai hingga perbukitan dan pegunungan).

### c. Jumlah Penduduk

Dilihat dari aspeknya penduduk mempunyai hubungan timbal balik dengan pembangunan. Penduduk Kabupaten Tanah Laut berperan sebagai subyek dan obyek dari pembangunan itu sendiri. Sebagai subyek pembangunan, maka penduduk dibina dan dikembangkan agar mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya sebagai obyek pembangunan, penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan menerima segala konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Adapun jumlah Penduduk Tanah Laut Semester II Tahun 2021 (data hasil integrasi dengan pemerintah pusat) adalah 348.226 jiwa yang terdiri dari 177.580 laki-laki dan 170.646 perempuan dan masih tampak bahwa penyebaran Penduduk masih bertumpu di Kecamatan Pelaihari dengan jumlah penduduk 77.933 jiwa kemudian diikuti Kecamatan Bati-bati 44.123 jiwa dan Kecamatan Kintap 42.638 Sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Bumi Makmur dengan jumlah penduduk 13.825 jiwa.

Tabel 1.1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sebaran Penduduk per Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin		
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Takisung	16.443	16.001	32.444
2	Jorong	17.356	16.395	33.751
3	Pelaihari	39.463	38.470	77.933
4	Kurau	7.043	6.870	13.913
5	Bati Bati	22.487	21.636	44.123
6	Panyipatan	12.571	12.379	24.950
7	Kintap	21.978	20.660	42.638
8	Tambang Ulang	9.217	8.863	18.080
9	Batu Ampar	14.031	13.244	27.275

10	Bajuin	9.938	9.356	19.294
11	Bumi Makmur	7.053	6.772	13.825
<b>JUMLAH</b>		<b>177.580</b>	<b>170.646</b>	<b>348.226</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

#### d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Pada saat ini Kabupaten Tanah Laut terbagi dalam 11 (sebelas) kecamatan, 130 (seratus tiga puluh) desa dan 5 (lima) kelurahan. Dalam tabel 1.2 berikut ini di sampaikan secara terperinci jumlah kecamatan beserta desa/kelurahan dan luas wilayah masing.

Tabel 1.2 Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut Beserta Jumlah Desa/Kelurahan Dan Luas Wilayah

No	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Kelurahan/ Desa	Luas wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase Luas Kecamatan dengan Luas Kabupaten
1	Panyipatan	Panyipatan	10	336,00	9,25
2	Takisung	Gunung Makmur	12	343,00	9,45
3	Kurau	Padang Luas	11	127,00	3,50
4	Bumi Makmur	Handil Babirik	11	141,00	3,88
5	Bati-Bati	Padang	14	234,75	6,46
6	Tambang Ulang	Tambang Ulang	9	160,75	4,43
7	Pelaihari	Pelaihari	20	379,45	10,45
8	Bajuin	Bajuin	9	196,30	5,41
9	Batu Ampar	Batu Ampar	14	548,10	15,09
10	Jorong	Jorong	11	628,00	17,29
11	Kintap	Kintapura	14	537,00	14,79
<b>Jumlah</b>			<b>135</b>	<b>3.631,35</b>	<b>100</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2021 (Badan Pusat Statistik)

#### e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 memiliki 40 (empat puluh) perangkat daerah dan 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) unit kerja perangkat daerah. Dalam tabel dibawah ini disampaikan secara terperinci jumlah perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 1.3 Daftar Perangkat Daerah SKPD Dinas Kesehatan

No	Perangkat Daerah
1	<b>Dinas Kesehatan</b>
2	<b>RSUD H. Boejasin Pelaihari</b>
3	<b>RSUD KH. Mansyur Kintap</b>
4	<b>UPT Instalasi Farmasi</b>
5	<b>UPT Laboratorium Kesehatan</b>
6	<b>UPT Puskesmas Pelaihari</b>
7	<b>UPT Puskesmas Asam-Asam</b>
8	<b>UPT Puskesmas Batakan</b>
9	<b>UPT Puskesmas Bati-Bati</b>
10	<b>UPT Puskesmas Jorong</b>
11	<b>UPT Puskesmas Kait-Kait</b>
12	<b>UPT Puskesmas Kintap</b>
13	<b>UPT Puskesmas Kurau</b>
14	<b>UPT Puskesmas Padang Luas</b>
15	<b>UPT Puskesmas Panyipatan</b>
16	<b>UPT Puskesmas Sungai Cuka</b>
17	<b>UPT Puskesmas Sungai Riam</b>
18	<b>UPT Puskesmas Tajau Pecah</b>
19	<b>UPT Puskesmas Takisung</b>
20	<b>UPT Puskesmas Tambang Ulang</b>
21	<b>UPT Puskesmas Tanjung Habulu</b>
22	<b>UPT Puskesmas Tirtajaya</b>
23	<b>UPT Puskesmas Angsau</b>
24	<b>UPT Puskesmas Bumi Makmur</b>

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2021

#### f. Gambaran Umum Dinas Kesehatan

##### 1. Struktur Organisasi

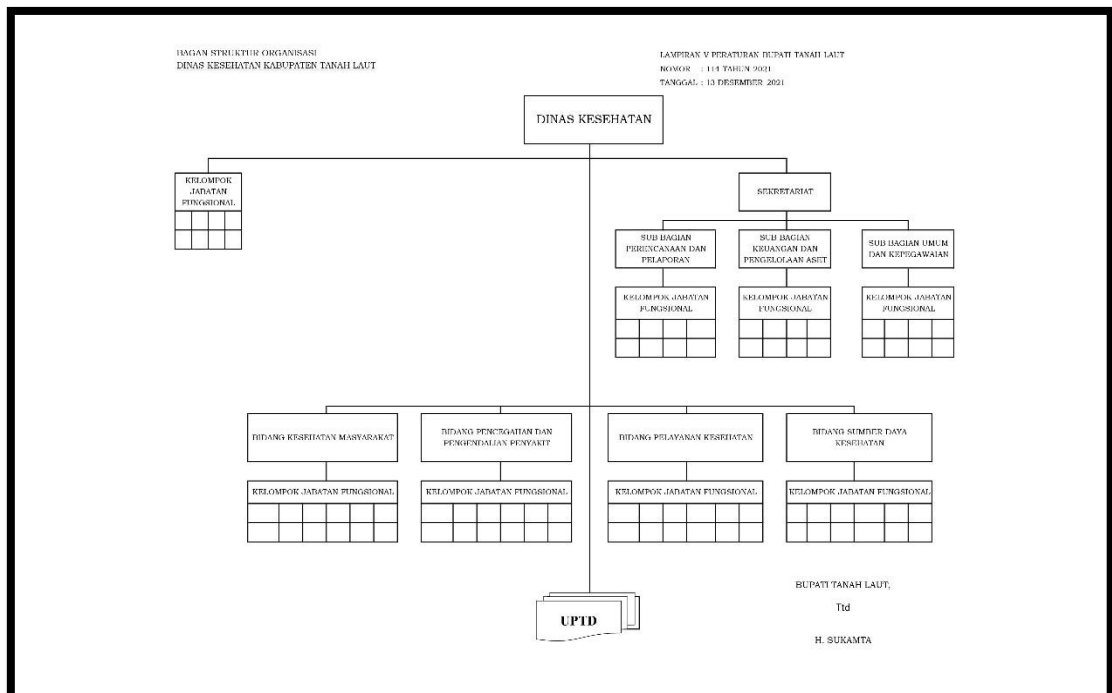
Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
- b. Pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

c. Pembinaan Operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

susunan organisasi dinas kesehatan kabupaten tanah laut sesuai dengan peraturan bupati kabupaten tanah laut nomor 114 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah kabupaten tanah laut

terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Bagian Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, UPT Dinas Kesehatan dan kelompok Jabatan Fungsional (dapat dilihat pada bagan SOTK).



Struktur Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK ) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat terdiri dari.
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset.
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari.
  - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.
  - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:
  - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi.
  - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- 4. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional.
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
  - c. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- 5. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
  - b. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
  - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- 6. UPT Dinas
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 1. Kepegawaian

Keberadaan sumber daya manusia kesehatan sebagai salah satu pendukung utama pelayanan kesehatan, dalam pelaksanaannya sangat mengutamakan pelayanan kesehatan baik melalui institusi puskesmas maupun yang langsung berhubungan dengan Dinas Kesehatan.

**Tabel 1.1**  
**JUMLAH PEGAWAI BERDASAR PENDIDIKAN, JABATAN**  
**DAN GOLONGAN Tahun 2021**

No	Nama Skpd	Jumlah Personil (Org)	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Personil (Org)	Gol	Jumlah Personil (Org)
1	Dinas Kesehatan	896	SD	2	I	2
			SLTP	4	II	172
			SLTA	71	III	657
			D3	533	IV	65
			D4/S1	272		
			S2	14		
	Total	896		896		896

Sumber : Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut th. 2021

#### **g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dengan prinsip sebagai berikut :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;\
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah .

#### **f. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

Pendapatan Asli Daerah :

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Penganggaran hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Transfer :

Dana Perimbangan :

- a. Transfer Umum
  - 1) Dana Bagi Hasil (DBH)
  - 2) Dana Alokasi Umum (DAU)
- b. Dana Transfer Khusus
  - 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
  - 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
  - 3) Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus
  - 4) Dana Insentif Daerah
  - 5) Dana Keistimewaan
  - 6) Dana Desa

Transfer Antar-Daerah :

- 1) Pendapata Bagi Hasil
- 2) Bantuan Keuangan

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :

- 1) Pendapatan Hibah
- 2) Dana Dana Darurat
- 3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

### 1) Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten

#### Tanah Laut Tahun 2021

Tabel 1. 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Retribusi Daerah	110.000.000,00	103.019.600,00	93,65
2.	Lain- Lain PAD Yang Sah	83.589.259.604,00	110.394.691.503,96	132,07
	<b>JUMLAH</b>	<b>83.699.259.604,00</b>	<b>110.497.711.103,96</b>	<b>132,02</b>

Sumber : LRA pada aplikasi SIMDA sampai dengan 31 Desember 2021

Secara keseluruhan Anggaran Rp. **83.699.259.604,00** terealisasi sebesar **Rp. 110.497.711.103,96** atau **132,02 %**.

Capaian realisasi anggaran pendapatan daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut

#### 1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang sah. Alokasi Anggaran Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp. 83.699.259.604,00 dengan realisasi sebesar Rp. 110.497.711.103,96 atau 132,02% dengan rincian:

- 1) Retribusi Daerah anggaran Rp.110.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.103.019.600,00 atau 93,65 %.
- 2) Lain-lain PAD yang Sah anggaran Rp.83.589.259.604,00 terealisasi sebesar Rp. 110.394.691.503,96 atau 132,02 %.

#### 2. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal Alokasi anggaran belanja daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp.447.018.832.047,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 373.375.993.262,21 atau 83,53%. Dengan rincian sebagai berikut :

##### Belanja Operasi

- 1) Belanja Pegawai anggaran Rp.104.753.845.021,00 terealisasi sebesar Rp.86.593.891.908,00 atau 82,66%.
- 2) Belanja Barang dan Jasa anggaran Rp.258.703.816.003,00 terealisasi sebesar Rp.214.665.385.945,38 atau 82,98 %.
- 3) Belanja Hibah anggaran sebesar Rp.981.750.000,00 terealisasi sebesar Rp.909.064.432,00 atau 92,60 %.

##### Belanja Modal

- 1) Belanja Modal Tanah anggaran Rp.0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin anggaran Rp.53.279.221.705,00 terealisasi sebesar Rp. 42.914.800.685,00 atau 80,00 %
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan anggaran Rp.28.030.499.318,00 terealisasi sebesar Rp. 27.066,00 atau 96,56 %
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi anggaran Rp.1.090.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.079.140.000,00 atau 99,00 %
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya anggaran Rp.179.700.000,00 terealisasi sebesar Rp. 147.215.500,00 atau 81,92 %

### **1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### **a. Permasalahan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut**

Permasalahan Dinas Kesehatan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut :

1. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, permasalahan yang dihadapi meliputi:
  - Masih terjadi kasus kematian ibu di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 sebanyak 13 orang, angka kematian ibu masih tinggi di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan;
  - perlunya peningkatan sarana prasarana dan sumber daya manusia di bidang kesehatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas (hasil rekomendasi dari Kementerian Kesehatan RI, Kabupaten Tanah Laut masih kurang 2 unit Puskesmas sesuai dengan kondisi jumlah penduduk);
  - pelayanan kesehatan belum optimal;

#### **b. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan adalah ketersediaan sumber dana yang jumlahnya terbatas. Diantara pilihan-pilihan kebijakan yang ada sudah barang tentu ada hal-hal yang harus dipilih untuk dikedepankan sebagai prioritas, karena jika semuanya dilaksanakan dengan menggunakan dana yang ada dengan membagi secara merata, akan berpotensi target yang dicanangkan sulit untuk dicapai atau dengan kata lain sulit untuk melihat hasil yang riil dari pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan analisa dan penelaahan terhadap Visi dan Misi RPJPD,

RPJMD, Prioritas Nasional dan Provinsi, masukan dari forum konsultasi publik, serta isu dan kondisi riil terbaru maka dirumuskanlah hal yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2020. Prioritas pembangunan daerah tahun 2021 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun 2021 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, yang keterhubungannya dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1.5 Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Sasaran
1	Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Keluarga, Masyarakat dan Lingkungan	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan
2	Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	

Sumber RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023

### c. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan. Perencanaan pembangunan tahun 2020 ini merupakan tahun kedua dari tahapan ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tanah Laut Tahun 2018-2023, perencanaan tahun 2020 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2016, hasil evaluasi RKPD tahun 2018 dan capaian kinerja RPJMD tahun 2018-2023, identifikasi isu strategis, serta permasalahan-permasalahan yang mendesak. Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan nasional memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, juga memperhatikan prioritas nasional dalam RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan.

## 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 maka sasaran daerah harus dijabarkan secara lebih rinci dan terukur untuk mempermudah operasional pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2021 disajikan di Tabel 1.15 berikut:

Tabel 1.6 Hubungan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup
			Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan <i>On Call</i>

### 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara terus menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan akses pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintah di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, maka pelayanan yang diberikan bukan hanya pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan SPM menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dimana penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota yang menjadi urusan wajib terdiri atas :

1. Pendidikan
- 2. Kesehatan**
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan Rakyat
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut, pemerintah daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 menjadikan penerapan SPM termasuk dalam isu strategis pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Isu strategis kemudian menjadi arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

2. Kebijakan Umum

Menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 yang merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, sebagai penjabaran dari tahun Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020. KUA-APBD juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2020 baik pada aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021, serta akan digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021 dapat semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Laut, serta pada pencapaian visi Kabupaten Tanah Laut.

Prinsip dan kebijakan umum APBD adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/ kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM disusun sebagai alat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM, hanya

beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing - masing perangkat daerah. Dalam hal ini kegiatan merupakan bagian dari program dan kegiatan dari unit kerja yang akan dibiayai melalui APBD. Dengan demikian tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah terdiri dari 6 pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 6 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7 Perangkat Daerah SKPD Dinas Kesehatan Pengampu SPM di Kabupaten Tanah Laut

NO	Perangkat Daerah	Pelayanan Dasar SPM
1	<b>Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut</b>	<b>Bidang Kesehatan :</b> <b>1. Pelayanan kesehatan ibu hamil</b> <b>2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin</b> <b>3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir</b> <b>4. Pelayanan kesehatan balita</b> <b>5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</b> <b>6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif</b> <b>7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut</b> <b>8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi</b> <b>9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus</b> <b>10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</b> <b>11. Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB)</b> <b>12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV</b>

**BAB II**  
**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN DAERAH**

**2.1 Capaian Kinerja Makro**

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Makro

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	Angka Kematian Ibu	123	13	267
2	Angka Kematian Bayi	11	9,6	3,6
3	Prevalensi stunting	10,67	22	6,41
4	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	0,13	0,8	0,17
	IKS ( Indeks Keluarga Sehat)	83,53	84,4	83,69

## 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran Dinas Kesehatan

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, rasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	<b>4 RS</b>	Dinas Kesehatan	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	<b>4 RS Dibina dan 1 RS Dipersiapkan Akreditasinya</b>	Dinas Kesehatan	
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<b>1. Vaksin Tetanus = 1.892 2. Table tambah darah = 873.172 3. Alat deteksi risiko ibu hamil</b>	Dinas Kesehatan	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alat tes kehamilan = 0</li> <li>b. Pemeriksaan Hb = 0</li> <li>c. Pemeriksaan golongan darah = 0</li> <li>d. Pemeriksaan glukoprotein urine = 0</li> <li>e. Kartu ibu / Family Folder KIA = 4460</li> </ul> <p><b>Buku KIA = 9133</b></p>		
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum = 43 orang</li> <li>2. Dokter spesialis kebidanan = 4 orang</li> <li>3. Bidan = 248 orang</li> </ul> <p><b>Perawat = 218 orang</b></p>	Dinas Kesehatan	
		4	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir partograf = 4.460</li> <li>2. Kartu Ibu (F2KIA) = 4.460</li> </ul> <p><b>Buku KIA = 9.133</b></p>	Dinas Kesehatan	
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum = 43 orang</li> <li>2. Dokter spesialis kebidanan = 4 orang</li> <li>3. Bidan = 248 orang</li> </ul> <p><b>Perawat = 218 orang</b></p>
		5	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vaksinasi Hepatitis B0 = 5.536</li> <li>2. Vitamin K1 Injeksi = 3.645</li> <li>3. Salep/tetes mata antibiotik = 10.596</li> </ul>	Dinas Kesehatan	

						<p>4. Formulir Bayi Baru Lahir = 4.460</p> <p>5. Formulir MTBM = 4.460</p> <p>Buku KIA = 9.133</p>		
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	<p>1. Dokter umum = 43 orang</p> <p>2. Dokter spesialis kebidanan = 4 orang</p> <p>3. Bidan = 248 orang</p> <p>Perawat = 218 orang</p>	Dinas Kesehatan	
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<p>1. Kuisiener Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instruen standar lain yang berlaku = 4.460</p> <p>2. Formulir DDTK = 4.460</p> <p>3. Buku KIA = 9.133</p> <p>4. Vitamin A Biru = 9.840</p> <p>5. Vitamin A Merah = 113.516</p> <p>6. Vaksin Imunisasi Dasar</p> <p>a. HB0 = 5.536</p> <p>b. BCG = 2.223</p> <p>c. Polio = 3.326</p> <p>d. IPV = 1.405</p> <p>e. DPT-HB-Hib = 5.343</p> <p>f. Campak Rubella = 2.144</p> <p>7. Vaksin Imunisasi Lanjutan</p> <p>a. DPT-HB_Hib = 5.343</p> <p>b. Campak Rubella = 2.144</p>	Dinas Kesehatan	

					8. Jarum suntik dan BHP = 79.350 Peralatan Anafiulatik = 0		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		1. Dokter umum = 43 orang 2. Dokter spesialis kebidanan = 4 orang 3. Bidan = 248 orang 4. Perawat = 218 orang Gizi = 50 orang	Dinas Kesehatan	
	7	1	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<b>19 Set buku Rapor Kesehatan</b>	Dinas Kesehatan
2				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	<b>19 PKM</b>	Dinas Kesehatan	
	8	1	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<b>IVA KIT = 21 Pcs KMS Posbindu = 4000 Pcs Posbindu KIT =40 Pcs</b>	Dinas Kesehatan
2				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>19 PKM</b>	Dinas Kesehatan	

		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<b>1. Strip uji pemeriksaan</b> <b>a. Gula darah = 0</b> <b>b. Kolesterol = 0</b> <b>2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT), dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) = 0</b> <b>Buku Kesehatan Lansia = 0</b>	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>1. Dokter umum = 43 orang</b> <b>2. Dokter spesialis kebidanan = 4 orang</b> <b>3. Bidan = 248 orang</b> <b>4. Perawat = 218 orang</b> <b>5. Gizi = 50 orang</b> <b>19 PKM</b>	Dinas Kesehatan	
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<b>Tensimeter = 40 pcs</b>	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelola program 19 PKM	Dinas Kesehatan	
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan	<b>Stik Gula Darah =56.000 Pcs</b>	Dinas Kesehatan	

			elayanan kesehatan sesuai standar		yang tersedia			
		2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelola program 19 PKM	Dinas Kesehatan		
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<b>SRQ = 1500 Pcs</b> <b>SDQ =1500 Pcs</b>	Dinas Kesehatan			
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelola Program 19 PKM	Dinas Kesehatan			
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. OAT Kat 1 / TB SO = 252 BOX 2. OAT KAT 2 = 14 BOX 3. OAT ANAK = 18 BOX 4. INH 100 Mg = 1.150 Tablet 5. Pot Dahak = 2.635 Pcs 6. Kaca Slide = 37 box 7. Reagen Zn = 60 box 8. Catridge TCM = 1.650 PCS ( Kadaluarsa =900 pcs) Masker Bedah = 3.900 Pcs (78 box)	Dinas Kesehatan			

			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai tandar	1. Puskesmas 19 x 3 org= 57 org (perawat, analis, dokter) Rumah sakit Puskesmas 1 x 6 org= 6 org (perawat, analis, dokter sp.P, farmasi, kesling, Gizi)	Dinas Kesehatan	
		14	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	RDTHIV 3.274pcs	Dinas Kesehatan	
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	19 pkm 2 RSU 68 Orang

## 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
Urusan Wajib							
2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = <b>377</b> $\frac{377}{348349} \times 100$ Jumlah Penduduk di Kabupaten = 348349 (Survey Penduduk Antar Sensus =SUPAS)	<b>0,11 %</b>	Dinkes	Rumah Sakit Daerah
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = <b>4 Rumah Sakit</b> $\frac{4}{4} \times 100$ Jumlah RS di Kabupaten = <b>4 Rumah Sakit</b>	<b>100 %</b>	Dinkes	
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = <b>5817</b> $\frac{5817}{6807} \times 100$ Jumlah ibu hamil di Kabupaten = <b>6807</b> (sasaran pusdatin)	<b>85,5%</b>	Dinkes	

		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = <b>6358</b> $\frac{6358}{6497} \times 100$ Jumlah ibu bersalin di Kabupaten = <b>6497</b> (sasaran pusdatin)	<b>97,86%</b>	Dinkes Dinkes	
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = <b>6332</b> $\frac{6332}{6367} \times 100$ Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten = <b>6367</b> (sasaran riil)	<b>99,45%</b>	Dinkes	
		6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = <b>23371</b> $\frac{23371}{25392} \times 100$ Jumlah balita di Kabupaten = <b>25392</b> (sasaran pusdatin)	<b>92,04%</b>	Dinkes	

		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p>Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = <b>36773</b></p> $\frac{36773}{47356} \times 100$ <p>Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten = <b>47356</b></p>	<b>77,65 %</b>	Dinkes Disdukcapil	
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<p>Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = <b>66797</b></p> $\frac{66797}{224677} \times 100$ <p>Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten = <b>224677</b></p>	<b>29,7 %</b>	Dinkes Disdukcapil	
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<p>Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = <b>8.498</b></p> $\frac{8.498}{35918} \times 100$ <p>Jumlah balita di Kabupaten = <b>35918</b> (sasaran pusdatin)</p>	<b>23,66 %</b>	Dinkes Disdukcapil	

		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = <b>14362</b> $\frac{14362}{26211} \times 100$ Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten = <b>26211 (Estimasi)</b>	<b>55 %</b>	Dinkes	
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = <b>3.825</b> $\frac{3.825}{4019} \times 100$ Jumlah penderita DM di Kabupaten = <b>4018</b>	<b>95,20 %</b>	Dinkes	
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = <b>439</b> $\frac{439}{501} \times 100$ Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten = <b>501 (estimasi)</b>	<b>87,8%</b>	Dinkes	
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 174 174	<b>3 %</b>	Dinkes	

				$\frac{5.409}{5.409} \times 100$ Jumlah penderita TBC di Kabupaten = 5.409			
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 4.620 $\frac{4.620}{7.287} \times 100$ Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten = 7.287	<b>63 %</b>	Dinkes	

### 2.3 Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Instruksi Presiden RI No.7 Th 1999 tentang AKIP).

Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut di atas dapat diartikan bahwa peningkatan status kesehatan masyarakat dan peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan harus terus selalu dilakukan secara berkesinambungan untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), prevalensi gizi stunting, meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dan meningkatkan indeks keluarga sehat.

Untuk menggambarkan kinerja sasaran strategis target dan realisasinya di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dari Eselon II sampai dengan Eselon IV selama kurun waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.4**

**Target dan Realisasi Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2020 dan 2021**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun ke						
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
		2020			2021			2023
<b>Meningkatnya keselamatan</b>	1. Persentase Ibu Hamil	85%	80%	94%	90 %	87%	96 %	100%

<b>ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat</b>	yang dilayani sesuai Standar							
	2. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	85%	90%	106%	90 %	96%	100,6%	100%
	3. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	92%	96%	104%	95 %	101 %%	100,6%	100%
	4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	90%	77%	86%	92 %	100 %%	100,1%	100%
<b>Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat</b>	1. Persentase Rumah Tangga berPHBS	40%	45%	113%	45 %	49,78%	101,6 %	60%
	2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100%	27%	27%	100 %	60%	60%	100%
<b>Meningkatnya Kesehatan Lingkungan,</b>	1. Persentase desa STBM	53,8%	71%	132%	69,2 %	69,67 %	100,6%	100%
	2. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80%	61%	76%	80 %	67,85 %	84%	80%
	3. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70%	81%	116%	70 %	50,9 %	72%	70%

<b>Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga</b>	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Olah Raga	100%	100%	100%	100 %	81,7 %	81%	100%
<b>Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>	1. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100%	57%	57%	100 %	100 %	100%	100%
	2. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100%	100%	100%	100 %	70 %	70%	100%
	3. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100%	80%	80%	47 %	77 %	106%	100%
<b>Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan</b>	1. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	37%	0%	0%	100 %	100 %	100%	68%
	2. Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%

	Public Service Center (PSC)							
	3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	19%	100%	525%	45 %	49,78%	101,6 %	100%
	4. Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	25%	0%	0%	30 %	0 %	0%	50%
	5. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanan Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	44%	52%	117%	48 %	100 %	200,8%	56%
	6 . Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	100%	100%	100%	100 %	98,96 %	98,9%	100%
<b>Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	65%	100%	154%	75 %	78%	104%	80%
	2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	89%	100%	112%	95 %	90,5%	95,2%	100%

	3. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	87%	100%	115%	90 %	90 %	100%	100%
	1. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100%	60%	60%	100 %	95%	95%	100%
<b>Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran</b>	1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%
	2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%
	3. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%
	4. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%
	5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%

	6. Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	71	71	100%	72	100	100 %	100
--	---	----	----	------	----	-----	-------	-----

### 2.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan strategis. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. IKU Dinas Kesehatan berjumlah 5 indikator. IKU ini digunakan untuk mengukur keberhasilan Tujuan strategis yang merupakan Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan

IKU Dinas Kesehatan merupakan Tujuan yang paling utama dari semua program dan kegiatan bidang kesehatan yaitu:

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat dengan Indikator sebagai berikut:
  - a. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup.
  - b. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup.
  - c. Prevalensi Stunting
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Indikator sebagai berikut :
  - a. Indeks Keluarga Sehat
  - b. Indeks Kepuasan Masyarakat

**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Utama**

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab/ Sumber Data	
1	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	1	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah kematian ibu dibagi jumlah lahir hidup dikali 100.000	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
		2	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Kematian bayi dibagi jumlah lahir hidup dikali 1.000	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
		3	Prevalensi stunting	Balita Stunting dibagi balita terentry di EPPGBM dikali 100%	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
2	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah keluarga dengan IKS > 0,800 dibagi dengan jumlah keluarga seluruhnya	Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
		2	Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai rata-rata tertimbang perunsur pelajaran dikali dengan 25	Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut seperti tersaji pada tabel diatas merupakan dasar untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyajikan laporan kinerja pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya.

Kinerja Utama/Tujuan Dinas Kesehatan Nomor 1 (satu) yaitu Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat adalah meliputi pengukuran peningkatan status kesehatan masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yaitu Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup, Prevalensi Gizi stunting, dengan kegiatan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan pelayanan gizi pada balita, kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta pencegahan dan pengendalian penyakit, penanggungjawab Bidang Kesehatan Masyarakat serta Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Sedangkan Kinerja Utama/Tujuan Dinas Kesehatan Nomor 2 (dua) yaitu Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan meliputi pengukuran Indeks Keluarga Sehat dan Indeks Kepuasan Masyarakat, kegiatannya berupa hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, akreditasi fasilitas kesehatan, pelayanan kegawatdaruratan oleh public service center (PSC), peningkatan status fasilitas kesehatan menjadi BLUD, upaya menjadikan desa dengan Indikator Keluarga Sehat (IKS) kategori sehat, pembinaan kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di desa, jaminan kesehatan kepada penduduk miskin, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan, serta pelayanan administrasi dan dukungan operasional perkantoran sesuai standar dan aturan, penanggungjawab Bagian Sekretariat, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan.

### **BAB III**

#### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat.

#### **A. Tugas Pembantuan Yang di Terima Dari Pemerintah / Pemerintah provinsi**

Dinas Kesehatan Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan yang dimaksud.

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Program, Kegiatan dan Pelaksanaan
4. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
7. Permasalahan dan Solusi

#### **B. Tugas Pembantuan Yang diberikan**

Dinas Kesehatan Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan yang dimaksud.

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
4. Sarana dan Prasarana

#### **C. Tugas, Fungsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut berdasar Peraturan Bupati Tanah Laut No. 67 Tahun 2016. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan.
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan.
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan.
  - d. pelaksanaan administrasi dinas.
  - e. pembinaan UPT Dinas.
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Evaluasi pengukuran kinerja tahun 2021 berdasarkan target sasaran Renstra Tahun 2021, pada umumnya dapat terealisasi semuanya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	90 %	87%	96 %
		2. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	90 %	96%	100,6%
		3. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	95 %	101 %%	100,6%
		4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	92 %	100 %%	100,1%
2	Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase Rumah Tangga berPHBS	45 %	49,78%	101,6 %
		2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100 %	60%	60%

3	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	1. Persentase desa STBM	69,2 %	69,67 %	100,6%
		2. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80 %	67,85 %	84%
		3. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70 %	50,9 %	72%
4	Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	100 %	100 %	100%
5	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100 %	81,7 %	81%
		2. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100 %	100 %	100%
		3. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100 %	70 %	70%
6	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	47 %	77 %	106%
		2. Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	100 %	100 %	100%
		3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	100 %	100 %	100%
		4. Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	30 %	0 %	0%
		5. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	48 %	100 %	200,8%
		6. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	100 %	98,96 %	98,9%
7	Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	75 %	78%	104%

		2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	95 %	90,5%	95,2%
		3. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	90 %	90 %	100%
		4. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100 %	95%	95%
8	Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100 %	100%	100 %
		2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100 %	100%	100 %
		3. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100 %	100%	100 %
		4. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100 %	100%	100 %
		5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100 %	100%	100 %
		6. Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	72		100 %

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dari Anggaran Rp. 530.718.091, 651 terealisasi sebesar Rp.483.873.704.366,17,-(91,17%), anggaran pendapatan daerah dari hasil Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dinas Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut adalah dari target Rp83.699.259.604,- terealisasi 110.497.711.103,96 (132,02%) (LRA versi BPKAD)

Untuk masa mendatang, kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut akan terus ditingkatkan, dengan melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran di lingkup Dinas Kesehatan, serta dukungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan capaian indikator kinerja utama dan sasaran strategis bidang kesehatan;
2. Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas program perlu ditingkatkan untuk pencapaian kinerja yang optimal;
3. Melakukan inovasi anggaran dan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai aturan yang berlaku di masa pandemi covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir untuk terus memberikan dan meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat serta mencapai target indikator kinerja utama dan sasaran strategis Dinas Kesehatan untuk mendukung keberhasilan visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

**BAB IV**  
**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**4.1 Bidang Urusan Kesehatan**

**4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang kesehatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada bidang kesehatan meliputi :

Tabel 4.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Pada Bidang Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke Atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11	Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB)	Sesuai standar pelayanan kesehatan Tuberkulosis (TB)	Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Setiap orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan Tuberkulosis (TB) sesuai standar
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien Tuberkulosis (TB), pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien Tuberkulosis (TB), pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

#### 4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021 dapat diuraikan sebagaimana berikut :

##### a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah Kabupaten/ Kota tersebut kurun waktu kehamilan. Berikut target pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2021:

Tabel 4.2 Target Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2021

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
	Jumlah ibu hamil yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 1 tahun	

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah kerjanya kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan/ Dokter/ Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Berikut target pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2021 :

Tabel 4.3 Target Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2021

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%
	Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 1 tahun	

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir merupakan pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan/ perawat/ Dokter/ Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Berikut target pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2021 :

Tabel 4.4 Target Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2021

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
	Jumlah semua bayi baru lahir yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 1 tahun	

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan/ Perawat/ Dokter/

DLP/ Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM. Pelayanan kesehatan, meliputi Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran Panjang/ tinggi badan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun, dan pemberian imunisasi dasar lengkap. Berikut target pelayanan kesehatan balita tahun 2021 :

Tabel 4.5 Target Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2021

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan anak	100%
	Jumlah balita 0-59 tahun yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 1 tahun	

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjangkaran kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas, standar pelayanan penjangkaran kesehatan adalah pelayanan yang meliputi penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia), penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas), penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen, penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garputala. Berikut target pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tahun 2021 :

Tabel 4.6 Target Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2021

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan	100%
	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 1 tahun ajaran	

f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pelayanan skrining diantaranya adalah deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut, deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah, deteksi gangguan mental emosional dan perilaku. Berikut target pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2021 :

Tabel 4.7 Target Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Tahun 2021

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%
	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 1 tahun	

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali setahun. Lingkup skrining kesehatan adalah deteksi hipertensi, dengan mengukur tekanan darah, deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah, deteksi kadar kolesterol dalam darah, deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan *Mini Cog* atau *Mini Mental State Examination (MMSE)*/ Tes Mental Mini atau *Abbreviated Mental Test (AMT)* dan *Geriatric Depression Scale (GDS)*. Berikut target pelayanan kesehatan pada usia lanjut tahun 2021 :

Tabel 4.8 Target Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Tahun 2021

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%
	Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 1 tahun	

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Setiap penderita hipertensi dengan sasaran penduduk usia 15 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Capaian kinerja pemerintah Kabupaten/ Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya kurun waktu satu tahun. Berikut capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi tahun 2021 :

Tabel 4.9 Target Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2021

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
	Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan prevalensi Kabupaten/ Kota kurun waktu 1 tahun pada tahun yang sama	

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.

Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut :

- 1) Edukasi
- 2) Aktifitas fisik
- 3) Terapi nutrisi medis
- 4) Intervensi farmakologis

Berikut target pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus tahun 2021 :

Tabel 4.10 Target Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Tahun 2021

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%
	Jumlah penyandang Diabetes Melitus berdasarkan angka prevalensi diabetes melitus nasional di wilayah kerja kurun waktu 1 tahun pada tahun yang sama	

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan, pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi edukasi dan evaluasi tentang tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau tindakan kebersihan diri ODGJ berat. Berikut target pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat tahun 2021 :

Tabel 4.11 Target Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun 2021

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	100%
	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota kurun waktu 1 tahun yang sama	

k. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)

Pelayanan tuberkulosis sesuai standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta. Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati Sampai Sembuh). Berikut target pelayanan kesehatan orang dengan TB tahun 2021 :

Tabel 4.12 Target Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB Tahun 2021

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%
	Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja kab/kota kurun waktu 1 tahun yang sama	

l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika. Berikut target pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV tahun 2021 :

Tabel 4.13 Target Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV  
Tahun 2021

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%
	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun yang sama	

#### 4.1.3 Realisasi

Realisasi atau pencapaian pelayanan dasar SPM pada bidang kesehatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Tahun 2021

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	1276	165	12.9%
		Batakan	100%	1314	61	4.6%
2	Jorong	Jorong	100%	1419	330	23.3%
		Asam -Asam	100%	2017	301	14.9%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	2830	989	34.9%
4	Kintap	Kintap	100%	2767	138	5.0%
		Sei Cuka	100%	1620	501	30.9%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	4570	1149	25.1%
		Sei Riam	100%	690	274	39.7%
		Angsau	100%	2766	910	32.9%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	717	295	41.1%
		Tirta Jaya	100%	1269	772	60.8%
7	Takisung	Takisung	100%	3379	594	17.6%
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	3753	710	18.9%
		Kait - Kait	100%	845	77	9.1%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	1855	439	23.7%
10	Kurau	Kurau	100%	400	83	20.8%
		Padang Luas	100%	1020	327	32.1%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	1411	383	27.1%
		<b>Spm Bidang Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>35918</b>	<b>8498</b>	<b>23.66%</b>

Tabel 4.15 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2021

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	808	1026	127.0%
		Batakan	100%	1089	932	85.6%
2	Jorong	Jorong	100%	1041	391	37.6%
		Asam -Asam	100%	1479	461	31.2%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	2056	677	32.9%
4	Kintap	Kintap	100%	2011	1281	63.7%
		Sei Cuka	100%	1192	492	41.3%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	3333	892	26.8%
		Sei Riam	100%	509	205	40.3%
		Angsau	100%	2017	866	42.9%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	525	641	122.1%
		Tirta Jaya	100%	923	2722	294.9%
7	Takisung	Takisung	100%	2455	1266	51.6%
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	2723	643	23.6%
		Kait - Kait	100%	620	245	39.5%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	1353	851	62.9%
10	Kurau	Kurau	100%	295	360	122.0%
		Padang Luas	100%	752	255	33.9%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	1030	156	15.1%
		<b>Spm Bidang Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>26211</b>	<b>14362</b>	<b>55%</b>

Tabel 4.16 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Tahun 2021

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	124	240	193.5%
		Batakan	100%	167	346	207.2%
2	Jorong	Jorong	100%	160	207	129.4%
		Asam -Asam	100%	227	103	45.4%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	315	99	31.4%
4	Kintap	Kintap	100%	308	328	106.5%
		Sei Cuka	100%	183	114	62.3%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	511	587	114.9%
		Sei Riam	100%	78	20	25.6%
		Angsau	100%	309	309	100.0%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	81	131	161.7%
		Tirta Jaya	100%	142	237	166.9%
7	Takisung	Takisung	100%	376	508	135.1%
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	417	209	50.1%
		Kait - Kait	100%	95	54	56.8%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	207	207	100.0%
10	Kurau	Kurau	100%	45	45	100.0%
		Padang Luas	100%	115	34	29.6%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	158	47	29.7%
		<b>Spm Bidang Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>4018</b>	<b>3825</b>	<b>95.20%</b>

Tabel 4.17 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun 2021

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	15	14	93.3%
		Batakan	100%	21	16	76.2%
2	Jorong	Jorong	100%	20	18	90.0%
		Asam -Asam	100%	28	12	42.9%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	39	22	56.4%
4	Kintap	Kintap	100%	38	43	113.2%
		Sei Cuka	100%	23	18	78.3%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	64	60	93.8%
		Sei Riam	100%	10	10	100.0%
		Angsau	100%	38	38	100.0%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	10	8	80.0%
		Tirta Jaya	100%	18	25	138.9%
7	Takisung	Takisung	100%	47	47	100.0%
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	52	40	76.9%
		Kait - Kait	100%	12	8	66.7%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	26	22	84.6%
10	Kurau	Kurau	100%	6	6	100.0%
		Padang Luas	100%	14	12	85.7%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	20	20	100.0%
		<b>Spm Bidang Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>501</b>	<b>439</b>	<b>88%</b>

Tabel 4.18 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB Tahun 2021

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	192	5	2.6%
		Batakan	100%	198	6	3.0%
2	Jorong	Jorong	100%	214	5	2.3%
		Asam -Asam	100%	304	4	1.3%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	426	8	1.9%
4	Kintap	Kintap	100%	417	4	1.0%
		Sei Cuka	100%	244	2	0.8%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	688	47	6.8%
		Sei Riam	100%	104	3	2.9%
		Angsau	100%	417	37	8.9%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	108	0	0.0%
		Tirta Jaya	100%	191	1	0.5%
7	Takisung	Takisung	100%	509	10	2.0%
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	564	28	5.0%
		Kait - Kait	100%	127	4	3.1%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	279	1	0.4%
10	Kurau	Kurau	100%	60	0	0.0%
		Padang Luas	100%	154	0	0.0%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	213	9	4.2%
		<b>Spm Bidang Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>5409</b>	<b>174</b>	<b>3%</b>

Tabel 4.19 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Tahun 2021

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	132	126	95.5%
		Batakan	100%	297	45	15.2%
2	Jorong	Jorong	100%	283	111	39.2%
		Asam -Asam	100%	305	425	139.3%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	653	420	64.3%
4	Kintap	Kintap	100%	566	213	37.6%
		Sei Cuka	100%	335	322	96.1%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	915	105	11.48%
		Sei Riam	100%	138	13	9.42%
		Angsau	100%	649	672	103.5%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	150	136	90.7%
		Tirta Jaya	100%	309	160	51.8%
7	Takisung	Takisung	100%	665	658	98.9%
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	815	474	58.2%
		Kait - Kait	100%	170	150	88.2%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	301	14	4.7%
10	Kurau	Kurau	100%	70	70	100%
		Padang Luas	100%	225	172	76.4%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	309	334	108.1%
		<b>Spm Bidang Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>7287</b>	<b>4620</b>	<b>63%</b>

Tabel 4.20 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2021

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	242	184	76.03%
		Batakan	100%	248	213	85.89%
2	Jorong	Jorong	100%	270	229	84.81%
		Asam -Asam	100%	382	416	108.90%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	535	439	82.06%
4	Kintap	Kintap	100%	524	502	95.80%
		Sei Cuka	100%	307	272	88.60%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	862	795	92.23%
		Sei Riam	100%	132	109	82.58%
		Angsau	100%	525	399	76.00%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	135	112	82.96%
		Tirta Jaya	100%	242	197	81.40%
7	Takisung	Takisung	100%	641	476	74.26%
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	709	608	85.75%
		Kait - Kait	100%	161	114	70.81%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	352	319	90.63%
10	Kurau	Kurau	100%	76	54	71.05%
		Padang Luas	100%	196	159	81.12%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	268	220	82.09%
		<b>Spm Bidang Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>6807</b>	<b>5817</b>	<b>85.46%</b>

Tabel 4.21 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2021

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	219	217	99.1%
		Batakan	100%	246	242	98.4%
2	Jorong	Jorong	100%	282	280	99.3%
		Asam -Asam	100%	442	440	99.5%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	491	484	98.6%
4	Kintap	Kintap	100%	546	543	99.5%
		Sei Cuka	100%	275	273	99.3%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	814	808	99.3%
		Sei Riam	100%	119	115	96.6%
		Angsau	100%	472	469	99.4%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	131	130	99.2%
		Tirta Jaya	100%	204	213	104.4%
7	Takisung	Takisung	100%	548	542	98.9%
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	645	646	100.2%
		Kait - Kait	100%	137	135	98.5%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	306	320	104.6%
10	Kurau	Kurau	100%	65	74	113.8%
		Padang Luas	100%	175	151	86.3%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	250	250	100.0%
		<b>Spm Bidang Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>6367</b>	<b>6332</b>	<b>99.45%</b>

Tabel 4.22 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2021

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	231	217	93.94%
		Batakan	100%	238	246	103.36%
2	Jorong	Jorong	100%	257	279	108.56%
		Asam -Asam	100%	364	430	118.13%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	511	491	96.09%
4	Kintap	Kintap	100%	500	548	109.60%
		Sei Cuka	100%	293	272	92.83%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	823	813	98.78%
		Sei Riam	100%	126	117	92.86%
		Angsau	100%	501	476	95.01%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	130	129	99.23%
		Tirta Jaya	100%	231	204	88.31%
7	Takisung	Takisung	100%	611	548	89.69%
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	678	646	95.28%
		Kait - Kait	100%	154	138	89.61%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	335	310	92.54%
10	Kurau	Kurau	100%	73	63	86.30%
		Padang Luas	100%	185	184	99.46%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	256	247	96.48%
		<b>Spm Bidang Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>6497</b>	<b>6358</b>	<b>97.86%</b>

Tabel 4.23 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pencapaian SPM Pelayanan Balita Tahun 2021

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pencapaian Spm Pelayanan Balita		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	902	893	99.0%
		Batakan	100%	929	854	91.9%
2	Jorong	Jorong	100%	1,003	855	85.2%
		Asam -Asam	100%	1,425	1419	99.6%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	2,000	1935	96.8%
4	Kintap	Kintap	100%	1,955	1952	99.8%
		Sei Cuka	100%	1,145	1117	97.6%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	3,230	3181	98.5%
		Sei Riam	100%	488	400	82.0%
		Angsau	100%	1,956	1576	80.6%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	506	442	87.4%
		Tirta Jaya	100%	898	720	80.2%
7	Takisung	Takisung	100%	2,389	2028	84.9%
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	2,652	2167	81.7%
		Kait - Kait	100%	598	590	98.7%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	1,312	1248	95.1%
10	Kurau	Kurau	100%	284	283	99.6%
		Padang Luas	100%	722	715	99.0%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	998	996	99.8%
		<b>Spm Bidang Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>25392</b>	<b>23371</b>	<b>92.04%</b>

Tabel 4.24 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Tahun 2021

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	6927	5536	79.9%
		Batakan	100%	9334	3691	39.5%
2	Jorong	Jorong	100%	8927	3113	34.9%
		Asam -Asam	100%	12679	2062	16.3%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	17628	2985	16.9%
4	Kintap	Kintap	100%	17236	6526	37.9%
		Sei Cuka	100%	10218	3276	32.1%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	28567	1940	6.8%
		Sei Riam	100%	4360	1275	29.2%
		Angsau	100%	17293	2081	12.0%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	4504	5081	112.8%
		Tirta Jaya	100%	7914	9269	117.1%
7	Takisung	Takisung	100%	21043	3969	18.9%
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	23338	3487	14.9%
		Kait - Kait	100%	5313	2341	44.1%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	11596	6893	59.4%
10	Kurau	Kurau	100%	2525	1487	58.9%
		Padang Luas	100%	6446	1013	15.7%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	8828	772	8.7%
		<b>Spm Bidang Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>224676</b>	<b>66797</b>	<b>29.7%</b>

Tabel 4.25 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2021

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	2197	1327	60.40%
		Batakan	100%	247	221	89.47%
2	Jorong	Jorong	100%	1942	500	25.75%
		Asam -Asam	100%	4133	4133	100.00%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	4306	4090	94.98%
4	Kintap	Kintap	100%	4557	4557	100.00%
		Sei Cuka	100%	390	371	95.13%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	8891	3081	34.65%
		Sei Riam	100%	773	773	100.00%
		Angsau	100%	4479	2466	55.06%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	199	199	100.00%
		Tirta Jaya	100%	1342	1342	100.00%
7	Takisung	Takisung	100%	3396	3376	99.41%
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	4381	4381	100.00%
		Kait - Kait	100%	1254	1254	100.00%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	849	682	80.33%
10	Kurau	Kurau	100%	347	347	100.00%
		Padang Luas	100%	1672	1672	100.00%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	2001	2001	100.00%
		<b>Spm Bidang Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>47356</b>	<b>36773</b>	<b>77.65%</b>

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Bidang Kesehatan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.26 Alokasi Anggaran SPM Urusan Bidang Kesehatan Tahun 2021

No	Indikator SPM bidang Kesehatan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung		Jumlah
			APBD	APBN	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			648.711.285	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			133.010.000	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			176.390.000	
4	Pelayanan Kesehatan Balita			390.586.354	
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar			240.218.000	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			298.105.000	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			290.565.000	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hypertensi			89.735.000	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			77.149.000	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			75.355.000	
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberculosis			137.033.000	

12	Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi HIV			56.810.000	
<b>JUMLAH</b>				<b>261.366.7639</b>	

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Tabel 4.27 Dukungan Personil/Ketenagaan Puskesmas SPM Urusan Bidang Kesehatan Tahun 2021

NO	Puskesmas	Jumlah Tenaga Kesehatan							
		Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Kesmas	Kesling	Atlm	Gizi
1	Angsau	3	2	13	15	0	1	2	1
2	Asam-Asam	2	1	12	16	0	1	2	2
3	Batakan	1	1	7	8	0	1	2	2
4	Bati-Bati	3	2	16	18	0	1	3	3
5	Bumi Makmur	3	1	6	16	1	3	2	3
6	Jorong	2	0	12	12	0	2	2	2
7	Kait-Kait	2	1	9	10	0	2	2	3
8	Kintap	2	1	13	16	0	2	2	2
9	Kurau	2	0	14	7	1	4	1	2
10	Padang Luas	1	0	7	10	1	2	2	2
11	Panyipatan	1	1	4	16	3	3	1	3
12	Pelaihari	6	2	16	29	1	3	2	4
13	Sungai Cuka	1	1	9	13	1	0	1	2
14	Sungai Riam	2	1	8	7	1	1	2	1
15	Tajau Pecah	2	1	24	21	1	1	2	4
16	Takisung	3	1	18	17	1	3	2	4
17	Tambang Ulang	2	1	11	13	2	2	1	2
18	Tanjung Habulu	2	1	10	9	0	1	2	1
19	Tirtajaya	4	1	9	14	1	1	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>19</b>	<b>218</b>	<b>267</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>45</b>

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.28 Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Urusan Bidang Kesehatan Tahun 2021

No	Permasalahan	Solusi
1.	Pendataan Sasaran SPM terlalu besar, semua siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, Balita, Usia Produktif, usia Lanjut dan kematian	Pendataan sasaran bisa mengoptimalkan Kader Kesehatan tetapi mesti harus ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan. Bisa Menggunakan data sasaran melalui LS seperti Dukcapil dan BPS

2.	Terbatasnya SDM di fasilitas Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Bidan desa dan tenaga kesehatan lainnya serta Kader Kesehatan.</li> <li>2. Kerjasama dan berkoordinasi dengan RS swasta, Klinik swasta dan perorangan/ praktek dokter/bidan</li> <li>3. Usulan Tenaga Kesehatan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.</li> <li>4. Rekrutmen tenaga Kontrak yang dibiayai Bantuan Operasional kesehatan sesuai dengan juknis yang berlaku.</li> </ol>
3.	Terbatasnya peralatan kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang menunjang pada kegiatan Pelayanan SPM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan keleluasaan Puskesmas dalam pembelian alat kesehatan sederhana dan bahan medis habis pakai/ <i>rapid test</i> dengan mempercepat proses puskesmas BLUD.</li> <li>2. Puskesmas bisa menganggarkan peralatan kesehatan sederhana dan bahan medis habis pakai melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat.</li> <li>3. Mempercepat proses pengadaan alat kesehatan dan BMHP.</li> <li>4. Mengusulkan alat kesehatan melalui dana APBN (DAK)</li> </ol>
4.	Juknis pada Pencapaian tiap indikator SPM terlalu banyak persyaratannya	Usulan peninjauan ulang Juknis SPM ke kementerian Kesehatan
5.	Ketidakjelasan kebutuhan biaya penganggaran alat kesehatan, BMHP maupun sumber daya kesehatan lainnya yang mendukung pencapaian SPM	Koordinasi lintas program untuk membuat Rencana Kebutuhan Belanja dalam pencapaian SPM

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun. Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 selain merupakan kewajiban perundang-undangan, maka tujuan pokok penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 ini adalah sebagai media untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2021, termasuk capaian kerjanya.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Capaian realisasi anggaran pendapatan daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang sah. Alokasi Anggaran Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp. 83.699.259.604,00 dengan realisasi sebesar Rp. 110.497.711.103,96 atau 132,02%
2. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal Alokasi anggaran belanja daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp.447.018.832.047,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 373.375.993.262,21 atau 83,53%.
3. Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan secara nasional dapat tercapai dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2021 melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 serta dokumen Rencana Strategis perangkat daerah pengampu SPM. Dari pelaksanaan tersebut tahun 2021 diperoleh hasil yang cukup baik dengan dapat mencapai standar minimal pada beberapa indikator capaian pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan. Namun masih terdapat beberapa pelayanan dasar SPM yang masih kurang realisasinya dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 2021 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan urusan Bersama dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi, perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan UPT Dinas, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kondisi yang belum sesuai dengan seluruh harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut bersama – sama dengan segenap komponen pembangunan terus bekerja sama untuk mewujudkan harapan – harapan dari seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Kedepannya akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan pelayanan pada tahun-tahun mendatang.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan pada tahun 2021 dapat berjalan baik, dengan manfaat dan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 ini disampaikan untuk penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan di Kabupaten Tanah Laut.